



Napak Tilas

sejarah perjalanan EITI di Indonesia

2002 - 2021





TONGGAK SEJARAH PERJALANAN EITI

Indonesia diterima secara resmi sebagai Kandidat Negara pelaksana EITI pada Oktober 2010, diumumkan di Dar es Salaam, Tanzania dalam EITI Board Meeting

2002

Perdana Menteri Inggris Tony Blair, memulai prakarsa transparansi di sektor industri ekstraktif

2003

G-8 menerbitkan deklarasi berjudul "*Fighting Corruption and Improving Transparency*" yang memprioritaskan transparansi sektor industri ekstraktif

2007

Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mendukung Indonesia bergabung dengan EITI

2008

Menko Perekonomian (Boediono) Menyusun kerangka EITI di Indonesia

2010

Presiden (SBY) menetapkan Perpres No. 26 / 2010

Indonesia menjadi *candidate country* EITI

2013

Publikasi Laporan EITI Indonesia pertama (*state revenue*) di 2009

2014

Publikasi Laporan EITI Indonesia kedua (2010-2011 *state revenue*)

Indonesia menerima *status compliance* EITI

2015

Publikasi Laporan EITI Indonesia ketiga (2012-2013 *state revenue*)

Status *compliance* ditunda menunggu Publikasi Laporan Eiti di 2012



2016

2017

2018

Indonesia memperbaiki
status *compliance*

Publikasi *Beneficial
Ownership Roadmap* (Peta
Jalan
Kepemilikan Perusahaan
Penerima Manfaat)

Publikasi laporan EITI
Indonesia Keempat
(2014 *state revenue*)

Publikasi Laporan EITI
Indonesia Kelima
(2015 *state revenue*)

laporan EITI
Indonesia Keenam
Tahun 2015-2016

Validasi Laporan
EITI Tahun 2015

2019

2020

2021

Laporan EITI
Indonesia Ketujuh
(2017 *Meaningfull Progres*)

Publikasi laporan
memenuhi penerapan
aspek persyaratan
standar secara
signifikan dan tujuan
yang lebih luas

Laporan EITI Indonesia
Kedelapan Tahun 2018

(tidak dilakukan tahapan
rekonsialisasi
karena pandemi Covid 19,
namun sesuai standar EITI)

Perpres No 82/2020,
pelaksanaan EITI Indonesia
dilaksanakan oleh KESDM
dan Kemenkeu sesuai
dengan tugas dan fungsi

Laporan EITI Indonesia
Kesembilan
Tahun 2019-2020

(tidak dilakukan tahapan
rekonsialisasi karena
pandemi Covid 19,
namun sesuai standar EITI)

Kepmen ESDM No 122/2021
terkait Keanggotaan
Forum Multi Stakeholder
yang revisi Kepmen ESDM
No 164/2021